



## Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Ketatanegaraan di Indonesia

Annisa Meilani Zakiah<sup>1</sup>, M Rizqi Maulana<sup>2</sup>, Muhammad Saddam Syahdan<sup>3</sup>, Nurlaili Rahmawati<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[saddamsy25@gmail.com](mailto:saddamsy25@gmail.com) , [rnurlaili086@uinjkt.ac.id](mailto:rnurlaili086@uinjkt.ac.id)

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received 24 Oktober 2024</p> <p>Revised 3 November 2024</p> <p>Accepted 11 November 2024</p>	<p><i>Identity politics is a rapidly growing phenomenon in the dynamics of Indonesian politics, where social identities such as religion, ethnicity, and race are used to gain support in elections. This phenomenon has the potential to cause polarization, division, and threats to national unity. This research focuses on analyzing the impact of identity politics on intergroup social relations, as well as how it can threaten national unity and political stability. The research method used is a literature review by analyzing sources such as books, journals, media articles, and regulations related to identity politics. This research also involves interviews with individuals directly involved to understand the impact of identity politics in society. The research results show that excessive identity politics can threaten diversity and exacerbate social tensions. Therefore, it is important to emphasize the values of tolerance and togetherness, and to encourage leaders to focus on vision and ideas rather than group identity.</i></p> <p><i>Keyword ; Identity politics, Pemilu, Nationality</i></p>

### Kata Kunci:

Politik Identitas  
Pemillu  
Ketatanegaraan

### Abstrak

Politik identitas merupakan fenomena yang berkembang pesat dalam dinamika politik Indonesia, di mana identitas sosial seperti agama, suku, dan etnis digunakan untuk meraih dukungan dalam pemilu. Fenomena ini berpotensi menimbulkan polarisasi, perpecahan, dan ancaman terhadap persatuan bangsa. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak politik identitas terhadap hubungan sosial antar kelompok, serta bagaimana hal tersebut dapat mengancam persatuan dan stabilitas politik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan menganalisis sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel media, dan peraturan terkait politik identitas. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan individu yang terlibat langsung untuk memahami dampak politik identitas di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas yang berlebihan dapat mengancam keberagaman dan memperburuk ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menekankan nilai toleransi dan kebersamaan, serta mendorong pemimpin untuk fokus pada visi dan gagasan daripada identitas kelompok

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



## **Pendahuluan**

Politik identitas telah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh kuat dalam dinamika politik Indonesia.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, peran politik identitas semakin mencuat dan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik di negara ini. Salah satu latar belakang masalah yang perlu dipahami adalah bahwa Indonesia adalah negara yang beragam secara etnis, agama, budaya, dan suku bangsa.<sup>2</sup> Dengan demikian, politik identitas menjadi penting karena masyarakat seringkali mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan faktor-faktor tersebut. Dalam konteks politik Indonesia, politik identitas sering digunakan oleh para pemimpin politik untuk memobilisasi dukungan massa. Para politisi sering kali memanfaatkan perbedaan-perbedaan identitas ini untuk menciptakan basis pendukung yang kuat.<sup>3</sup> Hal ini dapat mengakibatkan polarisasi politik dan konflik antar kelompok, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik negara. Oleh karena itu, peran politik identitas dalam memengaruhi pilihan politik dan pembentukan koalisi politik menjadi sangat signifikan.

Pengaruh politik identitas juga dapat dilihat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>4</sup> Beberapa kebijakan bisa saja didasarkan pada pertimbangan identitas tertentu, seperti agama atau suku bangsa, yang dapat memicu ketegangan dalam masyarakat. Contohnya, isu-isu agama

---

<sup>1</sup> "Politik Identitas Telah Menjadi Salah Satu Faktor Yang Berpengaruh Kuat Dalam Dinamika Politik Indonesia," *Lemhannas*, 2021, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1006-politik-identitas-tantangan-demokrasi-indonesia>.

<sup>2</sup> Anugrah Dwi, "Peran Politik Identitas Dalam Pemilihan Umum," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2023, <https://fisip.umsu.ac.id/peran-politik-identitas-dalam-pemilihan-umum/>.

<sup>3</sup> Unairnews, "Identitas Dan Politik Identitas Di Indonesia," *Unair.Ac.Id*, 2023, <https://unair.ac.id/identitas-dan-politik-identitas-di-indonesia/>.

<sup>4</sup> Yira Dianti, "Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4, no. 117 (2017): 5–24.



seringkali menjadi fokus perdebatan dan konflik dalam politik Indonesia, dan hal ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas politik. Selain itu pertentangan antara identitas agama dan identitas nasionalisme semakin meruncing yang mengakibatkan stabilitas negara terganggu.<sup>5</sup> Pada Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 menyebutkan Indonesia menganut kedaulatan rakyat (demokrasi) yang berdasarkan konstitusi.<sup>6</sup> Di Indonesia di mana agama Islam menjadi mayoritas hal ini yang menjadi tantangan tersendiri dalam konteks demokrasi. Pada sistem demokrasi yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Namun, kehadiran kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan agama, suku, atau etnis dalam berpolitik sering kali membuat politik terasa kurang menarik. Politisasi agama menjadi problematis ketika dilakukan secara berlebihan berdampak terhadap rusaknya relasi antarindividu dan antarkelompok sosial, serta menimbulkan keburukan yang berkepanjangan.<sup>7</sup> Permasalahan yang dihasilkan oleh politik identitas ini adalah terjadinya perbedaan didalam masyarakat, jika sekelompok menggunakan agama atau suku dalam berpolitik maka akan mengganggu masyarakat yang beragama lain, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan terhadap masyarakat yang kemudian saling menjatuhkan satu sama lain. Di Indonesia sendiri sering kita jumpai permasalahan tentang politik identitas ini yang diterapkan pada masa pemilihan umum (pemilu) atau pada pemilihan kepala daerah (pilkada) agar golongan atau kelompok tersebut memenangkan pemilihan.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa penelitian yang membahas politik identitas, diantaranya adalah *pertama*, skripsi yang ditulis oleh M. Sanopra, yang membahas tentang kemenangan dalam pemilihan

---

<sup>5</sup> Yeni Sri Lestari, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018).

<sup>6</sup> "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.

<sup>7</sup> Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia," *Maarif* 13, no. 2 (2018): 45, <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.

<sup>8</sup> Nur Lailatul Aidah et al., "Politik Identitas Dalam Pemilu Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Mei* 3, no. 1 (2023): 1–20.



gubernur Jambi Tahun 2020 dipengaruhi oleh politik identitas dengan menggunakan simbol paguyuban etnis yaitu paguyuban wisnu murti.<sup>9</sup> *Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Agus Saputro yang membahas tentang politik identitas agama yang digunakan oleh kandidat dalam pilpres 2019 untuk memenangkan kompetisi pemilu, seharusnya para kandidat dan tim kampanye menjadikan agama sebagai pemersatu dari perbedaan pilihan politik.<sup>10</sup> *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Kamaruddin Salim yang membahas tentang penggunaan politik identitas etnis dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara Pada Tahun 2013.<sup>11</sup> Namun, yang dibahas dalam jurnal ini membahas terkait fenomena politik identitas serta bagaimana politik identitas memainkan peran dalam kestabilan ketatanegaraan di Indonesia. Upaya-upaya untuk mempromosikan dialog antar kelompok, peningkatan kesadaran akan pluralitas masyarakat, dan pendekatan yang inklusif dalam pembuatan kebijakan dapat membantu mengurangi dampak negatif politik identitas terhadap stabilitas politik di negara ini.

### **Metode Penelitian**

Metode yang dipakai oleh penulis yaitu metode studi kepustakaan (*literature review*) dengan mengumpulkan sumber-sumber bacaan diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta berita media online yang membahas tentang politik identitas. Sumber bacaan tersebut diolah dan dideskripsikan dari umum ke khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Penulis juga melakukan penelitian lapangan, seperti survei atau wawancara dengan individu yang terlibat langsung dalam fenomena politik identitas, akan memberikan perspektif yang lebih konkret dan nyata mengenai dampak politik identitas di masyarakat.

---

<sup>9</sup> M. Sanopra, "Analisis Kemenangan Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Kota Jambi," 2023.

<sup>10</sup> Agus Saputro, "Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019," *Aketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2018).

<sup>11</sup> Kamaruddin Salim, "Politik Identitas Di Maluku Utara," *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 11, no. 2 (2015).



Dengan melibatkan data empiris ini, penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya temuan teoretis dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh politik identitas dalam praktik sosial sehari-hari.

## **Pembahasan**

### **Politik Identitas**

Menurut Miriam Budiardjo politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok untuk mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan antara anggotanya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Roger F. Soltau ilmu politik yaitu ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya dan negara-negara lain.<sup>13</sup> Disini ada perbedaan antara dua tokoh, Miriam Budiardjo mengartikan politik ini lebih ke dalam sisi internal dari suatu kelompok tersebut, tetapi Roger F. Soltau mengartikan politik ini ke arah kenegaraan. Menurut Stuart Hall, identitas adalah suatu hal yang terkait dengan kesadaran akan ikatan kolektivitas, yang menciptakan kesamaan dengan orang lain, namun juga melibatkan perbedaan. Identitas dibentuk oleh faktor kolektif dan kategori pembeda, serta melalui proses pemaknaan yang terus-menerus, di mana konsumsi dan produksi budaya saling berinteraksi tanpa henti.<sup>14</sup> Menurut Buchari sebagaimana dikutip Kamaruddin Salim politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang dibangun dari akar budaya suatu masyarakat serta mengalami proses internalisasi secara terus menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya.<sup>15</sup> Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>13</sup> Universitas BAKRIE, "5 Konsep Dasar Ilmu Politik," n.d., <https://bakrie.ac.id/articles/341-inilah-5-konsep-dasar-ilmu-politik-kamu-tertarik->.

<sup>14</sup> Nur Qoni'atul Mushlihah, "Konstruksi Identitas Anak Muda Urban Pembaca Karya Sastra Jawa," n.d., [https://repository.unair.ac.id/92303/4/FIS\\_IIP\\_87\\_19\\_Mus\\_k\\_SKRIPSI\\_JURNAL\\_PDF.pdf](https://repository.unair.ac.id/92303/4/FIS_IIP_87_19_Mus_k_SKRIPSI_JURNAL_PDF.pdf).

<sup>15</sup> Salim, "Politik Identitas Di Maluku Utara," 1669.



bahwa pengertian politik identitas dapat isibut sebagai suatu bentuk partisipasi politik yang berlandaskan pada identitas kolektif suatu kelompok, yang terbentuk melalui ikatan budaya dan pemaknaan terhadap perbedaan dan kesamaan. Proses ini terjadi dalam upaya kelompok untuk mendamaikan perbedaan internal dan mencapai keputusan bersama yang bersifat mengikat, baik dalam konteks kelompok maupun dalam interaksi dengan negara dan masyarakat lebih luas. Dengan demikian, politik identitas melibatkan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan keberagaman, serta upaya untuk mewujudkan aspirasi politik berdasarkan identitas bersama.

### **Fenomena Politik Identitas**

Identitas politik telah lama dibangun oleh sekelompok elite politik di Indonesia, sebagai rencana untuk menumbuhkan rasa benci terhadap lawan politik untuk menurunkan citra lawan politik yang dinilai kuat berpotensi untuk menang. Agar bisa menang, maka dibuatlah narasi-narasi yang tidak nasionalis dan intoleran kepada lawan politik. Sebenarnya, para politikus di Indonesia tidak lepas dari politik identitas. Karena pada dasarnya semua kerja politik membutuhkan kendaraan media lewat identitas, suku, ras, agama, budaya, gender dan antargolongan. Maka jika pengertian dari politik identitas ini kita sepakati, semua elite politik dan pekerja politik termasuk pengguna yang menggunakan identitas politik.<sup>16</sup> Namun seiring perkembangannya, politik identitas menjadi disalahgunakan dan hanya dipakai untuk merebut kekuasaan kelompok mayoritas memanfaatkan kekuatan kekuasaan. Penggunaan politik identitas semakin mengeraskan perbedaan dan semakin mendorong sebuah pertikaian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Andre Pebrian Perdana and Muslih, "Mendatang Impact of Identity Politics in the Future 2024 General," *Jurnal Kelitbang: Inovasi Pembangunan* 11, no. 2 (2024): 225–38.

<sup>17</sup> Andi Ainun Sabrina, "Politik Identitas: Masalah Bagi Moralitas Politik," *Komunikasi & Penyiaran Islam*, 2023, <https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/politik-identitas-masalah-bagi.html>.



Fenomena politik identitas dapat dilihat dari berbagai perspektif ;<sup>18</sup> *Pandangan yang pertama adalah pandangan primordialisme*, yang melihat identitas politik, terutama agama dan etnis, sebagai elemen sosiologis-biologis yang bersifat alami dan tidak dapat diperdebatkan. Kelompok sosial, dalam pandangan ini, ditandai oleh atribut-atribut seperti wilayah, agama, budaya, bahasa, dan organisasi sosial yang dianggap sudah melekat dan diberikan kepada kelompok tersebut. Dalam konteks ini, identitas etnik dan agama berfungsi untuk mempererat ikatan dalam komunitas, menjadikannya fondasi yang kuat bagi kohesi sosial. *Pandangan yang kedua adalah konstruktivisme*, berpendapat bahwa identitas agama dan budaya bukanlah hal yang tetap, melainkan hasil dari proses sosial yang kompleks dan dinamis. Identitas tersebut terbentuk melalui interaksi sosial, di mana individu dan kelompok berusaha mengeksploitasi simbol-simbol agama dan perilaku etnis tertentu sesuai dengan konteks situasional dan kebutuhan yang ada. Dalam pandangan ini, identitas menjadi penting karena berkaitan dengan harga diri dan citra diri, baik bagi individu maupun kelompok, yang dapat memengaruhi hubungan sosial dan politik mereka. *Pandangan yang ketiga adalah instrumentalisme*, menekankan bahwa identitas kelompok baik itu etnis, agama, ras, atau bangsa-sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pandangan ini melihat identitas sebagai sesuatu yang dapat dimobilisasi dan dimanipulasi demi keuntungan politik, baik oleh elit politik maupun kelompok tertentu. Dalam hal ini, kelompok minoritas sering kali dimanfaatkan oleh kelompok mayoritas atau elit untuk mencapai kepentingan politik tertentu, sehingga identitas menjadi sarana bagi perjuangan politik yang lebih luas. Secara keseluruhan, ketiga perspektif ini menggambarkan bagaimana identitas

---

<sup>18</sup> Dinar Astuti, Andi Agustang, and Idham Irwansyah Idrus, "Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2023): 1769–78, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.



dalam politik tidak hanya dibentuk oleh faktor-faktor biologis atau sosiologis, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai konteks politik.

Politik Identitas muncul di Indonesia dengan beragam dalam dinamika politik tidak terlepas dengan adanya rasa ketidakadilan dan kesamaan hak yang masing-masing diklaim oleh kelompok tertentu. Tolak ukur utama politik identitas adalah perbedaan yang sangat dipertegas. Jika konflik identitas politik terus dibiarkan maka bisa terjadi ketidakstabilan dalam negara.<sup>19</sup> Dalam konteks global, politik identitas menjadi sangat bahaya, seperti sejarah telah menjelaskan kekejaman NAZI kepada bangsa yahudi, dengan cara mengglorifikasi bangsa arya dan menindas bangsa yahudi dengan melakukan upaya genosida. Padahal, untuk identitas, etnis, adalah inheren sehingga kita tidak bisa memilih mau lahir dimana dan menjadi bangsa apa.<sup>20</sup> Menurut Siti Kholisah, politik identitas dapat membawa dampak antara lain :<sup>21</sup>

1. Polarisasi sosial, kelompok identitas masyarakat dapat terpecah tantangan mengembalikan agar masyarakat bersatu kembali sebagai bangsa yang berbeda tetap satu tujuan (Bhinneka Tunggal Ika)
2. Perlakuan tidak setara, pembatasan terhadap kebebasan dapat menghambat partisipasi warga dalam demokrasi, apalagi terhadap warga yang memiliki status sosial yang rendah.
3. Psikologi sosial masyarakat, yaitu masyarakat mudah tersinggung, dan mudah terbakar emosional dan juga gampang terprovokasi.

---

<sup>19</sup> Dinar Astuti, Agustang, and Idrus.

<sup>20</sup> Sabrina Soffer, "Orang Arab Dan Yahudi: Holocaust Dan Akibatnya," 2024, <https://fathomjournal.org/arabs-and-jews-the-holocaust-and-its-aftermath/>.

<sup>21</sup> I PUTU SASTRA WINGARTA, BERLIAN HELMY, and DWI HARTON, "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia (The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy)," 2021, 121.



Indonesia dalam konteks politik identitas kemudian dinilai sedang mengalami suatu potensi konflik relasi antara agama dan negara. Politik identitas diminati oleh elite politik di Indonesia, terlebih agama, sebagai “alat” jitu untuk meraup suara pemilih. Agama memang memiliki efek terhadap keikutsertaan politik. Dalam demokrasi politik identitas memang diperbolehkan, tetapi ketika politik identitas itu dilakukan berlebihan maka akan memiliki pengaruh-pengaruh yang tidak baik, terlebih di Indonesia yang mana masyarakatnya beragama, baik dari ras, suku, dan agama.

### **Dampak dan Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Ketatanegaraan di Indonesia**

Perkembangan politik identitas di Indonesia yang pluralistic mengancam persatuan dan kesatuan negara. Karena itu, perlu dipikirkan berbagai cara pendekatan untuk mengatasinya. Berbagai model pendekatan perlu dianalisis dan dipertimbangkan fektivitasnya. Pendekatan represif dalam menyelesaikan politik identitas yang disebabkan oleh pengalaman terpinggirkan dan tertindas bukanlah solusi tepat untuk mengatasinya, karena tidak menyentuh substansi akar masalah, yaitu kebutuhan alamiah manusia untuk diakui harkat dan martabatnya secara terbuka (isothymia). Pendekatan represif akan membawa mereka kembali pada memori kolektif pengalaman ketertindasan yang pernah dialami di masa lalu, dan berpotensi menguatkan perjuangan gerakan politik identitas yang mereka usung. Terlebih bila politik identitas muncul dari kelompok mayoritas agama atau suku potensi untuk berkembang menjadi tuntutan untuk diakui sebagai kelompok yang paling unggul dan paling benar (megalothymia) justru semakin besar.<sup>22</sup>

Identitas sebagai elemen politik sebenarnya tidak menjadi isu, karena itu merupakan bagian dari realitas asal kita. Tantangannya muncul ketika identitas ini disorot secara

---

<sup>22</sup> Agus Supratikno, “Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia” 1, no. 1 (2023): 18.



berlebihan, dimanipulasi untuk tujuan politik, sambil dibandingkan dengan identitas lawan. Meskipun kita hidup dalam keberagaman yang tak terhindarkan, kita tidak harus terperangkap dalam logika nol-sum di mana kemenangan satu pihak berarti kekalahan bagi yang lain, seperti dalam politik terbuka. Yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan politik identitas meredam rasionalitas, dengan konsekuensi berbahaya seperti kebijakan yang kurang tepat atau sekadar populis.<sup>23</sup> Berdasarkan analisis sederhana terhadap beberapa teori dan fakta sosial politik, berikut adalah ringkasan bahaya penyalahgunaan politik identitas terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai negara Pancasila:<sup>24</sup>

1. Ancaman terhadap keutuhan NKRI: Politik identitas yang menekankan identitas agama dapat mengancam keutuhan bangsa, bahkan ada kelompok yang mempersoalkan ideologi negara, yang sebelumnya tidak terjadi.
2. Menimbulkan adu domba/perpecahan: Politik identitas cenderung menciptakan adu domba antara pihak yang berbeda, terutama jika berkaitan dengan identitas agama atau personal, meningkatkan sensitivitas dan memicu permusuhan.
3. Ancaman terhadap pluralisme: Penyalahgunaan politik identitas dapat mengancam pluralisme dengan mengabaikan keberagaman suku, agama, dan pandangan hidup, yang seharusnya diakui dan dihargai.
4. Polaritas dan fragmentasi kekuatan politik: Identifikasi isu pribumi dan non-pribumi dapat memicu polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik, menciptakan ketegangan antar kelompok yang seharusnya hidup bersama dalam keberagaman.

---

<sup>23</sup> Leli Salman Al-Farisi, "Politik Identitas: Bangsa Dalam Negara Pancasila" 1, no. 2 (2018): 85.

<sup>24</sup> Al-Farisi, 86–87.



5. Potensi konflik: Perselisihan terkait agama dan klaim ketuhanan dapat menyebabkan konflik yang sulit diselesaikan, membawa dampak negatif pada stabilitas sosial dan politik.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahaya ini dan mendorong kesadaran akan pentingnya memelihara persatuan dalam keberagaman untuk menjaga kestabilan negara. Segregasi sosial yang terjadi secara horizontal membuat masyarakat terjebak dalam pemikiran "kami" dan "mereka" atau "saya" dan "dia," yang pada akhirnya membentuk pembagian kelompok secara tidak sadar. Eksklusivitas yang berlebihan, isolasi terhadap budaya yang berbeda, serta kecenderungan untuk menyalahkan kelompok yang tidak sepaham adalah contoh dari politik identitas yang berlebihan, yang justru tidak memberikan dampak positif dalam negara yang menjunjung semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" ini. Ke depan, hal ini berpotensi menyebabkan pemimpin dipilih bukan berdasarkan kinerja yang nyata, tetapi lebih berdasarkan latar belakang mereka. Kelompok minoritas bisa merasa terpinggirkan, sementara struktur politik akan semakin kabur karena tekanan dari mayoritas.<sup>25</sup>

Sekarang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana para pemimpin dan calon pemimpin bangsa bisa meyakinkan masyarakat bahwa pluralisme dalam bernegara adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan dengan baik bukan dilawan. Realitanya politik memang dinamis, tidak hanya dalam memilih kawan atau lawan, tetapi juga dalam ideologi dan prinsip. Kita hidup di negara yang multikultural, maka dari itu toleransi atau tenggang rasa sangat dibutuhkan untuk mendasari kehidupan bernegara, karena itu adalah pondasi dasar dari persatuan itu sendiri dan berperan sebagai jembatan agar tercapai budaya politik yang sehat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Razif Syauqi Adriananta, "Politik Identitas Di Indonesia Kini," 2018, [https://geotimes.id/opini/politik-identitas-di-indonesia-kini/#google\\_vignette](https://geotimes.id/opini/politik-identitas-di-indonesia-kini/#google_vignette).

<sup>26</sup> Andre Pebrian Perdana and Muslih, "Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang (Impact Of Identity Politics In The Future 2024 General Elections)" 11, no. 2 (2023): 236.



## **Penutup**

Politik identitas di Indonesia muncul sebagai fenomena yang berakar pada perbedaan sosial, budaya, dan agama, yang sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Meskipun pada dasarnya identitas politik merupakan bagian dari dinamika sosial, ketika disalahgunakan, hal ini dapat menimbulkan polarisasi, perpecahan, dan merusak persatuan bangsa. Ketika politik identitas lebih menekankan perbedaan daripada kesamaan, hal itu berpotensi mengancam stabilitas sosial dan memperburuk ketegangan antar kelompok. Di masa depan, pemimpin seharusnya tidak dipilih berdasarkan latar belakang identitas semata, melainkan berdasarkan visi, misi, dan kinerja yang nyata. Upaya untuk meredakan dampak negatif politik identitas perlu difokuskan pada penguatan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Untuk mengatasi dampak buruk dari politik identitas, para calon pemimpin dan tim kampanye sebaiknya lebih fokus pada ide dan gagasan yang inklusif, daripada memperburuk perbedaan yang ada. Pendekatan yang mengutamakan visi yang mendalam tentang kebersamaan dan persatuan dalam keragaman akan lebih memberikan dampak positif bagi masa depan Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang dampak politik identitas dalam kebijakan publik dan mencari solusi yang lebih aplikatif untuk mendorong terciptanya kehidupan berpolitik yang lebih sehat, adil, dan demokratis

## **Daftar Pustaka**

- Adriananta, Razif Syauqi. "Politik Identitas Di Indonesia Kini," 2018.  
[https://geotimes.id/opini/politik-identitas-di-indonesia-kini/#google\\_vignette](https://geotimes.id/opini/politik-identitas-di-indonesia-kini/#google_vignette).
- Aidah, Nur Lailatul, Sindy Rochmadian, Usna Maliha, Uin Sunan, Ampel Surabaya, and Kata Kunci Abstrak. "Politik Identitas Dalam Pemilu Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Mei* 3, no. 1 (2023): 1–20.
- Al-Farisi, Leli Salman. "Politik Identitas: Bangsa Dalam Negara Pancasila" 1, no. 2 (2018).
- Andre Pebrian Perdana, and Muslih. "Mendatang Impact of Identity Politics in the Future 2024 General." *Jurnal Kelitbangan: Inovasi Pembangunan* 11, no. 2 (2024): 225–38.



BAKRIE, Universitas. “5 Konsep Dasar Ilmu Politik,” n.d. <https://bakrie.ac.id/articles/341-inilah-5-konsep-dasar-ilmu-politik-kamu-tertarik->.

Budiardjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dianti, Yira. “Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4, no. 117 (2017): 5–24.

Dinar Astuti, Andi Agustang, and Idham Irwansyah Idrus. “Politik Identitas Dalam Kontroversi Isu Di Indonesia.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2023): 1769–78. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.

Dwi, Anugrah. “Peran Politik Identitas Dalam Pemilihan Umum.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2023. <https://fisip.umsu.ac.id/peran-politik-identitas-dalam-pemilihan-umum/>.

*lemhannas*. “Politik Identitas Telah Menjadi Salah Satu Faktor Yang Berpengaruh Kuat Dalam Dinamika Politik Indonesia.” 2021. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1006-politik-identitas-tantangan-demokrasi-indonesia>.

Lestari, Yeni Sri. “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama.” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018).

Mushlihah, Nur Qoni’atul. “Konstruksi Identitas Anak Muda Urban Pembaca Karya Sastra Jawa,” n.d. [https://repository.unair.ac.id/92303/4/FIS\\_IIP\\_87\\_19\\_Mus\\_k\\_SKRIPSI\\_JURNAL\\_PDF.pdf](https://repository.unair.ac.id/92303/4/FIS_IIP_87_19_Mus_k_SKRIPSI_JURNAL_PDF.pdf).

Perdana, Andre Pebrian, and Muslih. “Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang (Impact Of Identity Politics In The Future 2024 General Elections)” 11, no. 2 (2023).

Qurtuby, Sumanto Al. “Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia.” *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>.

Sabrina, Andi Ainun. “Politik Identitas: Masalah Bagi Moralitas Politik.” *Komunikasi & Penyiaran Islam*, 2023. <https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/politik-identitas-masalah-bagi.html>.

Salim, Kamaruddin. “Politik Identitas Di Maluku Utara.” *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 11, no. 2 (2015).

Sanopra, M. “Analisis Kemenangan Politik Identitas Dalam Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Kota Jambi,” 2023.

Saputro, Agus. “Agama Dan Negara : Politik Identitas Menuju Pilpres 2019.” *Aketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2018).

Soffer, Sabrina. “Orang Arab Dan Yahudi: Holocaust Dan Akibatnya,” 2024. <https://fathomjournal.org/arabs-and-jews-the-holocaust-and-its-aftermath/>.

Supratikno, Agus. “Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia” 1, no. 1 (2023).



Unairnews. “Identitas Dan Politik Identitas Di Indonesia.” *Unair.Ac.Id*, 2023.

<https://unair.ac.id/identitas-dan-politik-identitas-di-indonesia/>.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d.

WINGARTA, I PUTU SASTRA, BERLIAN HELMY, and DWI HARTON. “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia (The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy),” 2021.